

HUBUNGAN SEGITIGA ANTARA BIROKRAT PENGUSAHA DAN POLITIKUS PARTAI DEMOKRASI LIBRAL (*JIMINTOO*) DALAM PEMILIHAN UMUM DI JEPANG

I Made Sendra

Fakultas Pariwisata Universitas Udayana

ABSTRACT

In Japan, after The Second World War, the pressure groups came from big companies, which had important role to redevelop Japanese industries. Due to the fact that they were involved in establishing the economic policies since 1950, the political life style was expressed as though the domination of triangle's strength, such as; the Liberal Democracy Party (LDP) politician, bureaucrat, and businessman. Businessman (industrialist) as one of pressure groups wanted to control the government of ruling party to give political finance.

The pressure group, such as, *Zaikei* (the group of big companies), they got unilateral eases in terms of regulation, clearance and act. Nevertheless, the triangle relation was not permanent because the economic growth had made pollution and urbanization. It made contradiction to the politician's interest. The Japanese people prosecuted the LDP politician and bureaucrat to restrain the pollution and increase the social welfare and the life quality. The pressure group used many ways to influence and to control the government's policies by making Advisory Board (*Shingikai*) which was consisted of professional and common people.

The collusion, corruption and bribe scandal came into the fore involving the former Japanese prime ministers who were from the LDP politicians. They were caused by some factors such as: (a) the Japanese culture and the politician morality; (b) the election system of the House

of Representatives members; (c) the competition among the faction of LDP to become the president of LDP, which have a chance to be the Japanese prime minister.

Key words: pressure group, *zaikai*, LDP, Advisory Board, collusion, corruption, bribe, political morale, Japanese culture, election system, House of Representative, faction, prime minister.

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam Bab IV UUD Jepang disebutkan bahwa Parlemen Nasional (Diet), terdiri dari dua majelis yaitu: Majelis Rendah (*Shuugiin*) dan Majelis Tinggi (*Sangiin*). Anggota kedua Majelis itu adalah hasil pilihan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Masa kerja Majelis Rendah (*Shuugiin*) empat tahun, meskipun bisa berakhir sebelum masanya jika dibubarkan, dan keanggotaan Majelis Rendah (*Shuugiin*) adalah 464 orang pada pemilihan umum 1946, dan pada pemilu tahun 1972 meningkat menjadi 491 orang (Lihat *Nihon Koku Kenpoo*, 1993:106).

Masa jabatan untuk Majelis Tinggi (*Sangiin*) adalah enam tahun, dimana separoh jumlah anggotanya dipilih setiap tiga tahun. Selama periode setelah Perang Dunia II, anggota Majelis Tinggi (*Sangiin*) berjumlah 250 orang, meningkat menjadi 252 orang dengan kembalinya Okinawa kepada kekuasaan Jepang pada bulan Mei 1972. Keanggotaan Majelis Rendah dan Majelis Tinggi tidak boleh dirangkap oleh satu orang (Lihat *Nihon Koku Kenpoo*, 1993:105-106).

Untuk pertama kalinya setelah Perang Dunia II, pemilihan untuk anggota Majelis Rendah (*Shugiin*), diadakan pada tanggal 10 April 1946. Dalam pemilihan tersebut Partai Liberal (*Jiyutoo*)

di bawah pimpinan Hatoyama Ichiro, memenangkan jumlah kursi terbanyak yaitu: 141 kursi, dari 464 kursi namun belum menjadi partai yang mayoritas. Kabinet Hatoyama Ichiro tidak berjalan lama, karena ia kena program pembersihan yang dilakukan oleh *Supreme Commander for The Allied Power* (SCAP) digantikan oleh Yoshida Shigeru, membentuk pemerintahan koalisi yang tidak stabil antara Partai Libral (*Jiyutoo*) dengan Partai Progresif (*Shinpotoo*).

Kabinet Yoshida Shigeru tidak berhasil memperbaiki situasi perekonomian pasca PDII, sehingga menyebabkan mosi tidak percaya dari parlemen, dan selanjutnya diadakan pemilihan umum yang baru pada bulan April 1947. Dalam pemilihan tersebut, Partai Sosialis Jepang (*Nihon Shakaitoo*) memperoleh kemenangan 143 kursi. Partai Libral (*Jiyutoo*) memperoleh 131 kursi dan Partai Demokrasi (*Minshutoo*) sebagai nama baru dari Partai Progresif (*Shinpotoo*) memperoleh 121 kursi. Dari hasil pemilu ini terbentuklah pemerintahan koalisi dibawah pimpinan Perdana Menteri Katayama Tetsu dari Partai Sosialis (*Shakaitoo*).

Dalam pemerintahan koalisi ini duduk wakil-wakil dari Partai Sosialis (*Shakaitoo*), Partai Demokrasi (*Minshuutoo*), Partai Koperasi Rakyat (*Kokumin Kyodootoo*) dan Partai Libral (*Jiyutoo*). Namun pemerintahannya koalisi Katayama Tetsu, juga tidak berhasil menangani kesulitan krisis ekonomi pascaperang, menyebabkan ia harus mengundurkan diri pada bulan Februari 1948. Sebagai penggantinya adalah Ashida Hitoshi dari Partai Demokrasi (*Minshuutoo*) tetap dalam bentuk pemerintahan koalisi. Kabinet Ashida-pun gagal yang menyebabkan ia mengundurkan diri pada bulan Oktober 1948. Ia digantikan oleh Yoshida Shigeru dari Partai Libral (*Jiyutoo*) yang berubah nama menjadi Partai Libral Demokrasi (*Minshuujiyuutoo*) mengambil alih kekuasaan dan merencanakan pemilihan umum pada bulan Januari 1949 (JAA Stockwin, 1984:78-79).

Dalam pemilu bulan Januari 1949 tersebut Partai Liberal Demokrasi (*Minshuujiyotoo*) memperoleh mayoritas suara yaitu: 264 kursi dari 466 kursi di Majelis Rendah (*Shuugiin*). Partai Sosialis (*Shakaito*) perolehan suaranya menurun menjadi 48 kursi, dan Partai Demokrat (*Minshuutoo*) juga merosot menjadi 69 kursi, Partai Komunis Jepang (*Nihon Kyoosantoo*) memperoleh 35 kursi. Dengan perolehan suara mayoritas ini Partai Liberal Demokrasi (*Minshuujiyotoo*) dibawah pimpinan perdana menteri Yoshida Shigeru, akhirnya berhasil mempertahankan kinerja kabinetnya dan juga membina hubungan baik dengan Jendral Douglas Mac Arthur. Kabinet Yoshida Shigeru mampu bertahan sampai bulan Desember 1954 (JAA Stockwin, 1984:85).

Pada bulan Desember 1954 kedudukan perdana menteri Yoshida Shigeru digantikan oleh Hatoyama Ichiro dari Partai Demokrasi (*Minshuutoo*) yang berubah nama menjadi Partai Reformasi (*Kaishintoo*) dan membentuk Partai Demokrasi Jepang (*Nihon Minshuutoo*). Partai ini cukup berhasil dalam pemilu bulan february 1955, sedangkan Partai Liberal Demokrasi (*Minshuujiyuutoo*) memperoleh kegagalan. Partai Sosialis Sayap Kanan (*Uha Shakaitoo*) dan Partai Sosialis Sayap Kiri (*Saha Shakaitoo*) memperoleh kemenangan yang berarti.

Untuk mempersatukan kekuatan kedua kekuatan yaitu sayap kanan dan sayap kiri dari Partai Sosialis kembali bergabung pada bulan Oktober 1955 menjadi Partai Sosialis Jepang (*Nihon Shakaitoo*). Oleh karena desakan kepentingan bisnis dan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh kaum Sosialis dan kemungkinan terbentuknya pemerintahan Sosialis, maka Partai Demokrasi Jepang (*Nihon Minshuutoo*) bergabung dengan Partai Liberal Demokrasi (*Minshuujiyuutoo*) dan membentuk partai baru dengan nama Partai Demokrasi Liberal (*Jiyuuminshuutoo*) yang disingkat menjadi *Jimintoo* pada tahun 1955.

Kemenangan yang diperoleh oleh Partai Demokrasi Liberal (*Jimintoo*) dalam setiap pemilihan umum, disebabkan oleh adanya faksi (*habatsu*) dalam partai ini yang menjadi dinamisator dalam persaingan ke luar partai (*out group*), dan kadang-kadang juga menjadi bumerang bagi partai ini karena menimbulkan konflik ke dalam (*ingroup*) partai. Konflik ini muncul karena masing-masing ketua faksi (*habatsu*), berusaha mencari pendukung dari anggota Majelis Rendah supaya bisa menduduki ketua partai (*soosai*) untuk selanjutnya bisa dipilih sebagai perdana menteri. Ketua faksi (*habatsu*) umumnya memberikan 2-3 juta yen kepada setiap pendukungnya di Majelis (Parlemen) setiap akhir tahun sebagai bonus (*bon kure*).

Untuk memperoleh dana pemilihan yang begitu besar, baik untuk merekrut massa maupun untuk memperoleh dukungan dalam parlemen bagi ketua faksi (*habatsu*), dibutuhkan dana politik (*kenkin seiji*) yang sangat besar. Dana ini biasanya berasal dari dunia usaha, kontribusi partai dan sumbangan pribadi. Hal ini menyebabkan seorang politikus yang telah menduduki jabatan dalam kementerian untuk memperoleh dana pemilu yang besar mengadakan hubungan dengan dunia usaha, sehingga akan melahirkan hubungan segitiga permanent (*tetsu no sankakukei*), antara politikus, birokrat, dan kelompok dunia usaha sebagai kelompok penekan (*atsuryoko dantai*) (I Ketut Surajaya, 1994:25).

1.2 Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah: (1) mengapa dalam panggung politik di Jepang selama berkuasanya Partai Demokrasi Liberal (*Jiminto*), selalu terjadi kasus suap, korupsi dan kolusi dengan perusahaan-perusahaan besar?; (2) apakah kolusi dan kasus suap ini berpengaruh terhadap kredibilitas partai tersebut dimata konstituennya?; (3) bagaimanakah cara-cara Partai Demokrat Liberal (*Jimintoo*) dalam merekrut massa

pendukungnya, sehingga partai ini berhasil mendominasi panggung politik di Jepang selama tiga puluh delapan tahun?

1.3 Kerangka Konsep

Hubungan segitiga yang terjadi antara politikus Partai Demokrat Liberal dengan birokrat dan kelompok dunia usaha yang bermuara terjadinya kasus suap, kolusi dan korupsi dalam panggung politik di Jepang, merupakan praktik perilaku politik orang Jepang yang berakar pada nilai budaya masyarakat Jepang. Menurut Almond dan Powell (1978:25), mendefinisikan budaya politik sebagai: serangkaian sikap, kepercayaan dan perasaan mengenai kehidupan politik (*political current*) suatu bangsa pada suatu masa tertentu. Budaya politik ini terbentuk melalui perjalanan sejarah, melalui proses aktifitas sosial, ekonomi dan politik. Budaya politik mempengaruhi perilaku politik individu dalam peran politik mereka, mempengaruhi isi tuntutan politik mereka, dan tanggapan mereka terhadap UU.

Walter A Rosenbaum (1975:4), memahami budaya politik sebagai orientasi subyektif individu atau suatu kelompok terhadap elemen-elemen utama system politiknya, yaitu perasaan, pendapat, dan tanggapan individu terhadap simbol-simbol, institusi, dan aturan yang membentuk tatanan politik dalam masyarakatnya. Dengan kata lain, budaya politik merupakan nilai-nilai dasar yang dianut seseorang atau suatu kelompok yang mewarnai perilaku politik mereka. Karena ia merupakan nilai-nilai dasar, budaya politik merupakan “kaca mata” dengan alat tersebut seseorang atau suatu kelompok melihat dan memberikan makna terhadap fenomena politik di sekitarnya yang tercermin dalam perilaku politik mereka.

Dalam panggung politik di Jepang pasca Perang Dunia II, kelompok dunia usaha, serikat buruh, organisasi profesi bertindak sebagai kelompok penekan (*pressure group*), berperan besar dalam

mempengaruhi kebijakan politik pemerintah. Gabriel A Rosenbaum (dalam Mohtar Mas'ood (ed.) 1993:54-56), menyebutkan kelompok ini sebagai kelompok kepentingan, yaitu setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa pada waktu yang sama berkehendak memperoleh jabatan politik. Ia membedakan tiga jenis kelompok kepentingan yaitu: (a) anomik; (b) non asosiasional; (c) asosiasional.

Kelompok anomik seperti: demonstrasi, kurusuhan, tindakan kekerasan politik dan lain-lain. Kelompok non asosional merupakan ciri masyarakat yang belum maju kesadaran politiknya, dimana kesetiaan kesukuan atau keluarga aristokrat mendominasi kehidupan politik dan kelompok kepentingan yang khusus tidak ada atau lemah. Sedangkan kelompok asosiasi meliputi: serikat buruh, kamar dagang, perhimpunan usahawan atau industri, kelompok keagamaan dan paguyuban. Di Jepang kelompok-kelompok penekan (kepentingan) yang bersifat asosiasional, seperti: *Keidanren* (Federasi Organisasi Ekonomi Jepang), *Rengoo* (Federasi Serikat Buruh Jepang), *Chuushookigyoo Seiji Renmei* (Federasi Politik Industri Menengah dan Kecil).

2 Hubungan Segitiga Antara Birokrat, Pengusaha dan Politikus Partai LDP dalam Pemilu di Jepang

2.1 Sistem Pemilihan Umum di Jepang

Demokrasi adalah suatu sistem politik dimana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, dan pemerintahan dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam berpolitik, untuk memilih wakil-wakilnya dan melalui wakil-wakil tersebut rakyat ikut berpartisipasi dalam menentukan dan melaksanakan kebijaksanaan politik melalui partlemen (Ritsuo Akimoto dan Shigeru Katsumura, 1995:51; lihat juga mukadimah

UUD Negara Jepang 1947).

Dalam bab IV pasal 42 UUD disebutkan bahwa, Diet (parlemen) terdiri dari dua majelis yaitu: Majelis Rendah (*Shuugiin*) dan Majelis Tinggi (*Sangiin*). Kedua majelis ini keanggotaannya dipilih melalui pemilu. Konstitusi Jepang menjamin bahwa rakyat Jepang untuk berpartisipasi dalam pemilu. Hak pilih bagi orang dewasa dijamin pada pemilu di tingkat daerah maupun nasional. Pada tingkat nasional, pemilu dilakukan untuk memilih anggota-anggota parlemen yaitu Majelis Rendah (*Shuugiin*) dan Majelis Tinggi (*Sangiin*), sedangkan untuk tingkat daerah partisipasi rakyat dalam pemilu untuk memilih: (a) kepala pemerintahan daerah yaitu pemilihan gubernur propinsi dan memilih kepala pemerintahan kota praja; (b) pemilihan bagi anggota dewan daerah yaitu anggota dewan perwakilan rakyat propinsi dan anggota dewan kota praja (Lihat *Nihon Koku Kenpoo/The Constitution of Japan*, Bab IV pasal 43).

Sistem pemilihan yang berlaku di Jepang, sampai Januari 1994 adalah sistem distrik menengah (*chuusenkyokusei*) untuk pemilihan anggota Majelis Rendah (*Shuugiin*) dan gabungan antara sistem distrik dengan sistem proporsional (*hireidaihyokusei*) untuk memilih anggota Majelis Tinggi (*Sangiin*). Berdasarkan sistem pemilihan distrik menengah, wilayah Jepang dibagi menjadi 130 daerah atau distrik pemilihan. Setiap distrik pemilihan dipilih antara tiga sampai lima orang anggota (kecuali distrik Amami dan Oshima hanya satu wakil), dengan rasio satu wakil rata-rata untuk 220.000 orang pemilih (*Dai Nippon Printing, Co.Ltd*, 1990:3).

Berdasarkan sistem ini, maka ada daerah pemilihan tertentu dimana yang berebut kursi adalah calon dari partai yang sama, dan paling banyak adalah perebutan kursi di antara calon dari Partai Demokrasi Libral (*Jimintoo*). Akibatnya, akan terjadi persaingan di antara calon dari partai yang sama, sehingga kampanye politik

menjelang pemilihan umum bukan lagi kampanye program partai, tetapi kampanye program pribadi calon. Dalam kaitan ini Richar G. Niemi dan Herbert F Weisberg (1984:87), mengatakan bahwa, faktor-faktor yang berperan di dalam memengaruhi pemilih dalam memberikan suaranya adalah faktor partai, calon yang akan menduduki suatu jabatan, dan isu-isu politik yang dilontarkan. Selain itu, Hugh A Bone dan Austin Ranney (1981:5), mengakui adanya pengaruh status sosial dan ekonomi dalam menentukan sikap politik pendukungnya. Tetapi keduanya menambahkan keterikatan pada partai, calon dan isu-isu politik merupakan determinan paling langsung berpengaruh terhadap perilaku pemilihnya.

Dalam kasus pemilu di Jepang, karena pamilihan anggota Majelis Rendah (*Shuugiin*) memakai sistem distrik menengah (*chuusenkyokusei*), dengan sistem *multy seat*, dimana sumber-sumber pendukung masing-masing partai tidak merata di semua distrik, akibatnya ada daerah-daerah tertentu yang memperebutkan kursi yang berasal dari calon partai yang sama. Daya tarik seorang pemilih untuk memberikan pilihan dilihat dari faktor-faktor pribadi calon, seperti: karakter (*personality*), sifat-sifat, isu-isu yang dilontarkan, kemampuan untuk menangkap aspirasi aspirasi rakyat di daerah pemilihan sendiri, kemampuan untuk memanfaatkan emosi paternalistik, sangat menentukan dalam perolehan suara. (Soerjono Soekanto, 1993:358).

Pemilu untuk memilih anggota Majelis Tinggi (*Sangiin*), menggunakan gabungan sistem distrik (*chuusenkyokusei*) dengan sistem proporsional (*hireidaihyokusei*) (Meriam Budiardjo, 1983:177). Jumlah anggota Majelis Tinggi (*Sangiin*) yaitu 252 orang, yaitu 100 orang dipilih dari pemilihan tingkat nasional (*national constituency*), dan 152 orang dari pemilihan tingkat lokal (distrik). Masa jabatan Majelis Tinggi (*Sangiin*) adalah enam tahun, dimana setengah dari anggotanya dipilih dalam setiap tiga tahun

(*Dai Nippon Printing Co.Ltd*, 1989:37).

Pemilihan anggota Majelis Tinggi (*Sangiin*) yang berjumlah 100 orang dari tingkat nasional (*national constituency*), memakai sistem proporsional (*hireidaihyokusei*). Sesuai dengan sistem ini, seluruh Jepang terdapat 47 distrik pemilihan yang masing-masing mewakili propinsi yang disebut dengan istilah *to, doo, fu, ken*. *To* adalah untuk daerah khusus ibu kota Jepang (Tokyo), *doo* adalah daerah istimewa yaitu Hokkaido, *fu* adalah daerah istimewa Osaka dan Kyoto. Jumlah wakil untuk masing-masing distrik pemilihan berkisar antara satu sampai delapan orang dan dalam pemilihan setengah dari jumlah tersebut (satu sampai empat orang) dipilih kembali. Metode pemilihan sama dengan pemilihan anggota Majelis Rendah (*Shuugiin*).

Berdasarkan sistem ini yang dipilih adalah nama partai, maka seorang calon anggota Majelis Tinggi yang berada dalam garis netral (*musozoku*), harus menggabungkan diri dalam partai kecil (*miniseito*), sebab tanpa mewakili nama partai mereka tidak dapat mencalonkan diri. Oleh karena itu, di dalam Majelis Tinggi ini, banyak duduk wakil-wakil partai kecil (*miniseito*), seperti: Partai Baru Karyawan (*Sarariman Shintoo*), Partai Kesejahteraan Masyarakat (*Fukushitoo*), Partai Perdamaian Olah Raga (*Supotsu Heiwatoo*), Partai Pajak (*Zeikintoo*), Partai Jepang Baru (*Nihon Shintoo*), Partai Kemajuan (*Shinpotoo*) dan lain-lain.

Anggota Majelis Tinggi yang berasal dari partai-partai kecil (*Miniseitoo*) tercatat 22 orang dalam pemilu anggota Majelis Tinggi pada tahun 1986 dan meningkat menjadi 35 orang pada pemilihan tahun 1989. Mereka ini kebanyakan berasal dari dunia artis atau seniman seperti: sastrawan, penyiar radio, kritikus seni dan atlet. Kehadiran mereka kadang-kadang dimanfaatkan sebagai pengumpul suara (*foot getter*) oleh partai-partai besar dengan cara menempatkan nama-nama mereka dalam urutan daftar calon gugur.

2.2 *Habatsu* (Faksi) dan Fungsinya dalam Tubuh Partai Demokrasi Libral (*Jimintoo*)

Istilah *habatsu* diartikan sebagai klik (*qlique*) atau *faction* (faksi) (Lihat J. F. Echol, Hassan Shadily, 1984:230). Edwin O. Reischauer (1993:228), mendefinisikan faksi sebagai kelompok informal yang dipimpin oleh seorang politikus ternama yang berjuang untuk memperebutkan jabatan presiden partai dan kursi perdana menteri. Keberadaan faksi (*habatsu*) dalam tubuh partai mempunyai fungsi antara lain: (a) bagi pimpinannya, faksi merupakan basis utama untuk mempengaruhi partai dan merebut jabatan presiden partai (*soosai*); (b) bagi anggota faksi, persekutuan antara anggota faksi bisa membantu seorang anggota partai untuk dipilih menjadi anggota parlemen; (c) faksi juga menjadi sumber dana kampanye tambahan di luar dana yang disediakan oleh partai dan kemampuan untuk memperoleh dana untuk kegiatan politik menjadi syarat utama untuk menjadi pimpinan faksi yang berhasil; (d) dalam parlemen rapat faksi merupakan kesempatan seminar bagi anggota-anggota baru dan merupakan sarana bagi pemimpin partai untuk bertemu dengan anggota-anggotanya. Jadi keberadaan faksi-faksi dalam tubuh partai akan dapat membantu partai dalam menciptakan konsensus yang menjadi dasar bagi suara terpadu dalam sidang parlemen. (e) faksi juga bisa membantu anggota-anggotanya untuk memperoleh jabatan ketua komite dan wakil-wakil urusan parlemen dan akhirnya sebagai anggota kabinet. (Edwin O. Reischauer, 1982:228). Di samping itu, sistem faksi-faksi dalam satu partai selain menghinadari perpecahan partai menjadi partai-partai yang lebih kecil juga berfungsi untuk saling mengontrol diantara faksi-faksi yang ada dalam tubuh partai.

Asal mula lahirnya faksi-faksi dalam partai Demokrasi Libral (*Jiminto*), pada waktu dilaksanakannya pemilihan ketua partai pada tahun 1956. Ini adalah pemilihan ketua partai yang pertama setelah

terbentuknya Partai Demokrasi Liberal (*Jiminto*) tahun 1955. Partai ini merupakan penggabungan antara dua buah partai yang mempunyai platform yang sama-sama berhaluan konservatif (*hoshukei*), yaitu Partai Liberal (*Jiyuutoo*) dengan Partai Demokrasi Jepang (*Nihon Minshuutoo*), berdasarkan suatu konvensi tanggal 14 November 1955 bergabung menjadi Partai Demokrasi Liberal (*Jiyuuminshuutoo*) yang disingkat menjadi *Jiminto*. (Hane Bearwald, 1986:1).

Penggabungan kedua partai ini, dilatar belakangi oleh desakan kepentingan bisnis dan kemajuan yang dicapai oleh kaum sosialis terutama dengan bersatunya kembali kaum sosialis sayap kiri dan kanan dalam Partai Sosialis Jepang (*Nihon Shakaitoo*) pada bulan Oktober 1955, dan kemungkinan terbentuknya pemerintahan sosialis dalam kabinet Jepang (J.A.A. Stockwin, 1984:85-86). Terbentuknya Partai Demokrasi Liberal (*Jiminto*) juga tidak terlepas dari konstelasi politik dunia yaitu munculnya perang dingin antara Blok Barat (Amerika dengan Eropa Barat) dan Blok Timur (Unisoviet dengan beberapa negara komunis pasca-Perang Dunia II).

Partai Demokrasi Liberal dengan program partainya yang berhaluan konservatif, menyerukan dilestarikannya susunan sosial yang ada dan usaha-usaha untuk mempertahankan liberalisme ekonomi yang didasarkan pada perekonomian kapitalis. Mengenai masalah-masalah internasional, partai ini pada prinsipnya telah mengusahakan hubungan kerja sama yang berkesinambungan dengan Amerika Serikat dan menggalakkan diplomasi damai sebagai salah satu anggota Negara-negara Blok Barat (Ritsuo Akimoto dan Shigeru Katsumura, 1995:74). Partai ini juga memperjuangkan usaha untuk merevisi UUD Negara Jepang yang dianggap sebagai konstitusi yang disponsori oleh tentara pendudukan, terutama pasal IX yang menginginkan peningkatan kekuatan pertahanan (*increase defensive power*) setarap dengan kemampuan nasional,

meningkatkan kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat dan mengakui hak untuk mengizinkan kapal selam nuklir Amerika untuk memasuki pelabuhan-pelabuhan di Jepang. Sedangkan Partai Sosialis Jepang (*Nihon Minshuutoo*) yang berhaluan progresif (*kakushin-kei*), menentang revisi terhadap UUD Negara Jepang (terutama pasal IX), menentang perjanjian keamanan dengan Amerika Serikat, memperjuangkan diplomasi yang bersifat netral dan merdeka, menentang persenjataan kembali dengan senjata nuklir dan memperjuangkan keamanan Jepang-Unisoviet (Warren M. Tsunaeshi, 1966:130-131).

Keberadaan faksi-faksi dalam tubuh partai Demokrasi Liberal (*Jimintoo*), dapat dipandang sebagai dinamisator dalam persaingan dengan luar partai (*out-group party*) dan kadang-kadang menjadi boomerang bagi partai tersebut, karena dapat menimbulkan persaingan antara ketua faksi untuk memperebutkan jabatan ketua partai (*soosai*) yang membuka peluang sebagai perdana menteri (*soori daijin*). Masing-masing ketua faksi akan memberikan dana dua sampai tiga juta yen kepada setiap pendukungnya di parlemen setiap akhir tahun sebagai bonus. Oleh karena itu, anggota-anggota faksi akan lebih loyal kepada ketua faksinya daripada kepada partainya (Hane Baerwald, 1986:2).

Rasa persaingan dan tidak puas diantara faksi dalam tubuh partai Demokrasi Liberal, juga menyangkut keadilan pembagian kekuasaan (*power sharing/bunyo gata*) antara faksi. Dalam sistem *power sharing* ini, biasanya ketua partai yang telah menduduki kursi perdana menteri menunjuk orang yang berasal dari faksi lain untuk menduduki sekretaris jendral (sekjen) partai (*kanjichoo*). Dalam hal ini ketua partai (perdana menteri) akan berkonsultasi dalam pelaksanaan kebijakan dan politik pemerintahan. Kerawanan sering terjadi pada pihak ketua partai apabila *power sharing* ini tidak berjalan dengan mulus, disebabkan karena ketua faksi dimana

sekjen partai berafiliasi juga menginginkan posisi sebagai ketua partai untuk merebut kursi perdana menteri.

Di samping *system power sharing* dalam mempertahankan posisinya sebagai ketua partai (perdana menteri), ia juga menjalankan kekuasaannya berdasarkan *system power directing* (*shirei gata*). Berdasarkan sistem ini, biasanya ketua partai akan menunjuk orang yang berasal dari faksi yang sama sebagai sekjen partai (*kanjichoo*). Dalam hal ini ketua partai (perdana menteri) akan mengendalikan kekuasaan pemerintahan, sedangkan sekjen partai akan mengendalikan birokrasi, seperti pengelolaan personalia, dana politik pemilu, dan kebijakan parlemen. Dengan demikian berdasarkan sistem ini kekuasaan politik akan terpusat pada satu faksi.

Segi positif keberadaan faksi-faksi dalam Partai Demokrasi Libral, menunjukkan adanya pragmatisme (*pragmatic political style*) dari para politisinya, seperti kemampuan partai yang sangat sensitif untuk menangkap isu-isu atau situasi dan keadaan masyarakat. Misalnya, partai ini selalu siap untuk menerima peranan pemerintah yang besar dalam mengatur bisnis atau menjalankan kebijakan negara kesejahteraan (Edwin Reischauer, 1993:224). Pada tahun 1972 ketika rakyat Jepang meneriakkan tuntutan program kesejahteraan, Partai Demokrasi Libral dibawah pimpinan perdana menteri Tanaka Kakuei, segera mengadopsi isu-isu ini melalui peningkatan pengeluaran biaya untuk program kesejahteraan dan perhatian terhadap orang-orang lanjut usia (orang jompo). Demikian juga sebaliknya ketika partai ini digoncang oleh kasus suap Lockheed yang melibatkan perdana menteri Tanaka Kakuei tahun 1974, penggantinya adalah Takeo Miki (dari faksi Miki) sebagai perdana menteri mengumumkan kebulatan tekadnya untuk memberantas suap dan korupsi dalam program kabinetnya sehingga ia dijuluki sebagai Mr. Clean yang menginginkan pemerintahan yang bersih (Ronald J.

Hrebenar,1986:236).

2.3 Politik Uang dan Hubungan Kelompok-Kelompok Penekan dengan Partai Demokrasi Libral

Menurut Gabriel A. Almond (dalam Mochtar Mas'ood dan Colin Mac Andrews, 1993:53-54), mendefinisikan kelompok penekan (*pressure group*), sebagai kelompok kepentingan yaitu setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan politik pemerintah, tanpa pada waktu yang sama berkehendak memperoleh jabatan publik. Lebih lanjut Gabriel A. Almond membagi tiga jenis kelompok-kelompok kepentingan yaitu: (a) anomik; (b) non asosiasionil; (c) asosiasionil. Kelompok-kelompok anomik, seperti demonstrasi, kerusuhan, tindakan kekerasan politik dan lain-lain. Kelompok non asosiasionil merupakan ciri masyarakat yang belum maju, dimana kesetiaan kesukuan atau keluarga-keluarga aristokrat mendominasi kehidupan politik. Kelompok asosiasional meliputi serikat buruh, kelompok keagamaan dan paguyuban.

Peranan kelompok-kelompok penekan dalam panggung politik Jepang, merupakan fenomena baru dalam sejarah politik Jepang modern pasca Perang Dunia II. Di bawah UUD Meiji (1898-1945) peranan kelompok penekan tidak begitu menonjol, karena peran pemerintah yang didominasi oleh kelompok militer sangat menentukan dalam penyusunan kebijaksanaan politik negara. Dapat dikatakan bahwa, besarnya peranan kelompok penekan dalam panggung politik Jepang merupakan pengaruh dari sistem politik Amerika, khususnya ketika Jepang diduduki oleh Tentara Pendudukan dibawah Panglima Tertinggi Pasukan Sekutu (*Supreme Commander For Allied Power/SCAP*) dengan markas besarnya (*General Head Quarter*) dipimpin oleh Jendral Douglas MC Arthur yang berkedudukan di Tokyo (Lihat Ryosuke Ishii,1988:165-166). Rancangan UU negara Jepang sebagai pengganti dari UUD Meiji

berasal dari Markas Besar Panglima Pendudukan Sekutu (GHQ), setelah mendapatkan persetujuan dari parlemen direstui oleh kaisar tanggal 3 November 1946 dan mulai berlaku pada bulan Maret 1947.

Dalam panggung politik di Jepang, kelompok-kelompok penekan yang besar, memiliki organisasi yang rapi dengan kekuatan uangnya ikut menentukan kebijaksanaan politik pemerintahan. Kelompok-kelompok ini adalah kelompok-kelompok para pengusaha besar (*zaikai*). Kelompok ini diintegrasikan secara ketat melalui sejumlah organisasi yang paling utama adalah *Keidanren* (*Keizai Dantai Rengokai*) yaitu Federasi Organisasi Ekonomi Jepang. Kelompok-kelompok lainnya seperti *Nihon Rodo Kumiai Shorengo* yaitu Federasi Serikat Buruh Jepang. *Nihon Ishiki* yaitu asosiasi dokter Jepang, *Chuushookigyoo Seiji Renmei* (Federasi Politik Industri Menengah dan Kecil), *Shuukyoo Dantai* (Kelompok Keagamaan) dan lain-lain. (I Ketut Surajaya, 1994:26).

Kelompok kepentingan tertentu dari golongan pengusaha-pengusaha besar, sangat berperan dalam membangun industri Jepang sesudah perang. Karena keikutsertaan mereka dalam pembentukan kebijaksanaan ekonomi sejak tahun 1950-an, kehidupan politik di Jepang sering digambarkan seperti dikuasai oleh kekuatan segi tiga yang terdiri dari para politikus dari Partai Demokrasi Liberal (*Jimintoo*) yang menduduki posisi seperti Komisi Tetap Parlemen (*Jonin Inikai*), departemen (*shoochoo*), dan seksi-seksi (*bukai*) dalam partai dengan para birokrat (*kanryoo*) dan dunia usaha (*zaikai*).

Hubungan segitiga antara anggota-anggota parlemen (*giin*), birokrat (*kanryoo*) dengan kelompok-kelompok penekan (*atsuryoko dantai*) yang berasal dari dunia usaha (*zaikai*) dapat dijelaskan sebagai berikut. Anggota-anggota parlemen (*giin*) menetapkan APBN (*yoosan*), birokrat (*kanryoo*) melaksanakan APBN, memberikan bimbingan administrasi (*gyoosei seido*), perizinan (*kyoninka*)

dan bantuan anggaran (*yosan sochi*) kepada kelompok-kelompok penekan terutama dari dunia bisnis (*gyookai*) dan industri (*kigyoo*). Sebaliknya dari dunia bisnis dan industri memberikan bantuan pemilihan (*senkyoo no shien*) dan dana politik (*seiji shikin*) kepada anggota-anggota parlemen.

Kolusi antara anggota-anggota parlemen (*giin*), birokrat (*kanryo*) dan kelompok-kelompok kepentingan dapat berupa perundang-undangan, peraturan, bimbingan, pendukung dan dana-dana politik. Tarik menarik antara sudut segitiga inilah yang kadang-kadang tidak sehat sehingga melahirkan skandal suap, kolusi atau korupsi (lihat I Ketut Surajaya, 1994:26). Tetapi model segitiga kekuasaan ini, tidak sepenuhnya benar. Hal itu terjadi dalam masalah-masalah pertumbuhan ekonomi industri, yang merupakan kepentingan dunia usaha (*zaikai*). Dalam bidang inipun model ini, tidak lagi menggambarkan kenyataan sejak tahun 1970-an, ketika pertumbuhan ekonomi menimbulkan masalah-masalah polusi dan urbanisasi yang parah, kepentingan politisi dan Partai Demokrat Liberal (*Jimintoo*) dan para birokrat mulai bertentangan dengan kepentingan para pengusaha besar. Dalam menanggapi tuntutan masyarakat para politisi dan birokrat semakin berkepentingan dengan kebijakan pengendalian polusi, kualitas hidup, jaminan sosial dan masalah-masalah yang bertentangan dengan tujuan pertumbuhan ekonomi yang dikejar oleh para pengusaha besar Jepang. Dunia usaha (*zaikai*) memang masih merupakan kelompok penekan yang paling berpengaruh, tetapi ia sekarang hanyalah salah satu dari banyak kelompok penekan.

2.4 Pembaharuan Sistem Politik Jepang (*Seiji Kaikaku*)

Munculnya berbagai skandal kolusi, suap dan korupsi dalam panggung politik Jepang yang melibatkan mantan Perdana Menteri Jepang, seperti Tanaka Kakuei dalam peristiwa Lockheed

(*rokkido jiken*) tahun 1976, peristiwa Rekrut (*rikuruto jiken*) yang melibatkan Mantan Perdana Menteri Takeshita Noboru tahun 1989, peristiwa Kyowa Sagawa Kyubin (*Kyowa Sagawa Jiken*) tahun 1991, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (a) budaya moral dan politik masyarakat Jepang; (b) sistem pemilihan umum yang dipakai di Jepang untuk pemilihan anggota Majelis Rendah (*Shugiin*); (3) persaingan sengit antara pimpinan faksi dalam tubuh Partai Demokrasi Libral (*Jimintoo*), sebagai partai yang memerintah (*yootoo*) dalam memperebutkan posisi sebagai ketua partai (*soosai*) yang selanjutnya membuka peluang untuk meduduki kursi sebagai Perdana Menteri Jepang.

Keberhasilan seorang calon dalam merekrut suara di mana ia dicalonkan, sangat ditentukan oleh kemampuan calon untuk memperhatikan ikatan primordial, seperti ikatan *oyabun-kobun* dengan cara mengirimkan kartu ucapan tahun baru, kartu ucapan perkawinan atau uang bela sungkawa bagi keluarga yang meninggal, membantu siswa untuk dapat masuk ke sekolah pilihan, mengusahakan pekerjaan bagi lulusan perguruan tinggi di distrik yang diwakilinya (lihat Chie Nakane dalam Murakami Hyoe and Edward G. Sedensticker, Tokyo:1977:82). Di samping itu, juga ditentukan oleh kemampuan calon untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dari distriknya, seperti perjuangan untuk mendapatkan bagian dari anggaran pemerintah pusat atau daerah untuk wilayah pemilihannya dalam bentuk dana subsidi untuk pembangunan jembatan, jalan raya, jalur kereta api, sarana-sarana umum dan sekolah.

Hal ini pernah dilakukan oleh mantan Perdana Menteri Tanaka Kakuei untuk memperjuangkan distrik di mana ia dicalonkan, yaitu dengan memberikan jaminan perlindungan hidup kepada pendukungnya terutama di daerah Nigata. Tanaka membuka jalan baru, memperbaiki fasilitas kesehatan, pendidikan, memperbaiki

kehidupan orang-orang jompo yang terisolir didaerah pegunungan, mengalirkan listrik dan memberikan sistem pemanas kepada penduduk Nigata yang tepencil yang terkena serangan salju ganas pada musim dingin. Oleh karena itu, walaupun akhirnya Tanaka Kakuei terbukti terlibat dalam skandal suap peristiwa Lockheed, tetapi bagi pendukung di daerah pemilihannya, ia adalah seorang pahlawan sekaligus pembela kepentingan daerah pemilihannya dengan memanfaatkan kekuasaan yang ia miliki. Berdasarkan sikap serupa seorang politikus yang dituduh menerima suap, belum tentu kalah dalam pemilihan berikutnya. Hal ini dibuktikan dengan peristiwa Lockheed yang diakhiri dengan penghukuman Tanaka Kakuei selama empat tahun dan denda 500 juta yen, yang kemudian disusul dengan pemilu anggota Majelis Rendah. Sebelum peristiwa Lockheed melibatkan Tanaka Kakuei dalam pemilu 1972, ia memperoleh suara 182.681 pemilih dan setelah ia dijatuhi vonis pengadilan dalam pemilihan berikutnya ia memperoleh suara 220.761 orang. Dari logika ini dapat disimpulkan bahwa yang dipersalahkan oleh masyarakat Jepang bukanlah masalah suap Tanaka semata-mata, tetapi masalah moral politik secara keseluruhan (I Ketut Surajaya, Jakarta: 1984).

Setelah perdana Menteri Tanaka Kakuei terlibat peristiwa Lockheed, maka sebagai penggantinya adalah Miki Takeo sebagai perdana menteri Jepang. Ia dikenal sebagai tokoh yang bersih dari segala kasus dan dalam program kabinetnya ia berusaha untuk mewujudkan citra pemerintahan yang bersih sehingga ia dijuluki sebagai Mr. Clean. Ia menyatakan bahwa sumber dari segala kecurangan yang mengarah kepada kasus suap, kolusi, dan korupsi adalah cara-cara pemilihan ketua partai (*soosai*) yang akan menduduki posisi perdana menteri. Seorang ketua faksi supaya ia mendapatkan banyak pendukung dalam pemilihan ketua partai, ia memberikan 2-3 juta yen kepada setiap pendukungnya di parlemen. Oleh karena

itu, pemilu di Jepang menghabiskan banyak biaya dan untuk menutupi ini, salah satu cara yang ditempuh oleh ketua faksi setelah ia terpilih menjadi perdana menteri adalah dengan cara mengadakan kolusi dengan pengusaha besar yang akhirnya menimbulkan skandal suap dan korupsi (Kishimoto Koichi, 1982:70).

Selama 38 tahun Partai Demokrasi Liberal (*Jimintoo*) berkuasa, kasus suap dan korupsi selalu muncul kepermukaan yang melibatkan perdana menteri yang berasal dari partai ini, sampai akhirnya membawa kekalahan telak bagi partai ini dalam pemilihan umum untuk anggota Majelis Rendah (*Shuugiin*) tanggal 18 Juli 1993 yang melahirkan pemerintahan koalisi tujuh partai dibawah pemerintahan perdana menteri Morihiro Hosokawa (I Ketut Surajaya, 1995:9). Pada tanggal 10 Agustus 1993, sehari setelah kabinet Hosokawa terbentuk, dalam konferensi pers ia mengatakan bahwa, ia akan mengundurkan diri apabila ia gagal menyelesaikan program pembaharuan politik yang dicanangkan dalam kabinetnya, antara lain: (a) pembaharuan sistem pemilihan umum (*senkyoo seido keikaku*); (b) pembaharuan peraturan pengawasan dana politik (*seiji shikin kisei*). Pada tanggal 27 Agustus 1993, Kabinet Hosokawa menetapkan RUU Pembaharuan Politik (*seiji kaikaku hooan*), yaitu suatu sistem berdampingan antara sistem distrik dan sistem proporsional. RUU ini berisi sistem distrik untuk memilih 250 anggota Majelis Rendah dan 250 orang ini dipilih dengan sistem proporsional dengan mekanisme pemilihan dua kartu pemilihan. Rancangan ini berdasarkan hasil voting yang diadakan dalam sidang Majelis Rendah tanggal 18 November 1993 yang akhirnya dapat disetujui.

Rancangan ini diajukan ke sidang Majelis Tinggi tanggal 21 Januari 1994. Berdasarkan hasil voting yang diadakan menghasilkan 130 orang menolak dan 118 orang setuju sehingga sidang mengalami jalan buntu yang akhirnya menghasilkan kompromi antara Hosokawa (wakil pemerintah) dan Yohei Kono (wakil LDP).

Kompromi ini menghasilkan kesepakatan, yaitu 300 orang wakil akan dipilih menurut sistim distrik kecil, 200 orang dipilih menurut sistem proporsional bagi semua anggota Majelis Rendah. Hasil kompromi inilah yang disetujui sebagai UU pembaharuan politik yang disahkan oleh parlemen dalam sidang plenonya pada tanggal 29 Januari 1994.

Sesuai dengan peraturan pengawasan dana politik (*seiji keikaku kisei*) yang baru, ditentukan bahwa, dana-dana politik yang diperoleh dari publik tidak boleh disalurkan langsung kepada politisi, tetapi harus melalui Badan Dana Politik Partai (*Seitoo Seiji Shikin Dantai*). Sumbangan pribadi (*kojin*), industri atau perusahaan (*kigyoo*), organisasi buruh (*Rodoo Kumiai*), Badan Pengelola Dana (*Shikin Kanri Dantai*) dan badan-badan lain termasuk pendukung (*sono ta no seiji dantai/kooenkai*), tidak dibenarkan menyalurkan langsung dana politik kepada para politisi tetapi harus melalui lembaga-lembaga dana politik (I Ketut Surajaya, 1995:9).

3. Kesimpulan

Munculnya berbagai skandal kolusi, suap, korupsi dalam panggung politik Jepang, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: (1) budaya dan moral politik masyarakat Jepang; (2) sistem pemilihan umum yang dipakai di Jepang dalam pemilihan anggota Majelis Rendah (*shugiin*); (3) persaingan ketat antara pimpinan faksi (*habatsu*) dalam tubuh Partai Demokrasi Libral dalam memperebutkan posisi ketua partai (*soosai*) sebagai calon perdana menteri.

Budaya politik merupakan nilai-nilai dasar yang dianut seseorang atau suatu kelompok yang akan berpengaruh terhadap perilaku politik/kelompok yang bersangkutan. Budaya Jepang mengenal ikatan primordial *oyabun-kobun*, budaya *on-giri* dipakai sebagai cara oleh politikus Partai Demokrasi Libral (*Jimintoo*)

dalam merekrut massa pendukungnya. Keberhasilan calon untuk memperoleh dukungan di daerah (distrik) ia dicalonkan sangat ditentukan oleh kemampuan calon dalam memelihara ikatan-ikatan primordial *oyabun-kobun*, seperti mengirimkan kartu ucapan tahun baru, ucapan perkawinan, uang belasungkawa (karangan bunga) dan sebagainya. Ikatan *oyabun-kobun* dalam pemilu di Jepang menyebabkan pemilu biaya tinggi.

Pemilihan umum untuk anggota-anggota Majelis Rendah (*Shugiin*) di Jepang, menggunakan sistem pemilihan distrik menengah (*chuusenkyokusei*) dengan sistem multi *seat*. Kelemahan dari sistem ini muncul akibat adanya komposisi demografi dan pendukung dari masing-masing partai politik pada setiap daerah pemilihan yang tidak merata. Akibatnya ada daerah pemilihan tertentu dimana yang berebut kursi adalah calon dari partai yang sama yang kebanyakan berasal dari Partai Demokrasi Libral. Akibatnya kampanye politik menjelang pemilu bukan lagi kampanye program partai, tetapi program pribadi calon. Adapaun segi positif dari sistem pemilihan distrik menengah adalah aspirasi rakyat di daerah akan berusaha diperjuangkan oleh calon yang bersangkutan dalam usaha dia untuk tetap mendapatkan dukungan dari daerah dimana dia dicalonkan. Sebagai contoh mantan perdana menteri Tanaka Kakuei memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah Nigata, seperti membuka jalan baru, memperbaiki fasilitas kesehatan, memperbaiki kehidupan orang-orang jompo dan lain-lain. Oleh karena itu, walaupun akhirnya ia terlibat dalam skandal suap Lockheed, tetapi bagi pendukung di daerahnya dia adalah seorang pahlawan yang telah memperjuangkan kepentingan daerahnya. Berdasarkan sikap ini, seorang politikus yang dituduh menerima suap, belum tentu akan kalah dalam pemilihan umum berikutnya. Hal ini membuktikan bahwa yang dipersoalkan masyarakat Jepang bukanlah masalah suap yang dilakukan oleh Tanaka, tetapi masalah moral politik secara keseluruhan.

Munculnya skandal suap dan korupsi dalam panggung politik di Jepang juga disebabkan oleh tatacara pemilihan ketua partai (*soosai*). Seorang ketua faksi (*habatsu*), supaya mendapatkan pendukung dalam parlemen untuk pemilihan ketua partai maka dia harus memberikan 2-3 juta yen kepada setiap pendukungnya. Oleh karena itu pemilu di Jepang menghabiskan biaya banyak. Untuk menutupi biaya tersebut maka ketua partai setelah dia menjabat sebagai perdana menteri mengadakan kolusi dengan pengusaha-pengusaha besar sehingga melahirkan skandal suap dan korupsi. Selama 38 tahun Partai Demokrat Liberal berkuasa, skandal suap, korupsi dan kolusi selalu muncul ke permukaan dan melibatkan mantan-mantan menteri yang berasal dari partai ini. Sampai kasus ini akhirnya menyebabkan kekalahan telak bagi Partai Demokrat Liberal (*Jimintoo*) dalam pemilihan umum untuk anggota Majelis Rendah tanggal 18 Juli 1993, yang melahirkan pemerintahan koalisi tujuh partai di bawah pimpinan perdana menteri Hosokawa Morihiro.

Kabinet Hosokawa Morihiro berusaha untuk memperjuangkan program pembaharuan politik di Jepang (*seiji kaikaku*), dengan tujuan untuk memperbaiki sistem pemilu sebelumnya. Program pembaharuan politik ini diarahkan pada: (a) pembaharuan pada sistem pemilu (*senkyoo seido kaikaku*); (b) pembaharuan pengaturan pengawasan dana politik (*seiji shikin kisei*). Pada tanggal 27 Agustus 1993, kabinet Hosokawa mengajukan rancangan undang-undang (RUU) pembaharuan politik (*seiji keikaku hooan*), yaitu suatu sistem berdampingan antara sistem distrik dan sistem proporsional. Rancangan ini dapat disetujui dalam sidang Majelis Rendah tanggal 18 November 1993. Kemudian rancangan ini diajukan ke sidang Majelis Tinggi tanggal 21 Januari 1994. Berdasarkan hasil kompromi antara Hosokawa (wakil pemerintah) dan Yohei Kono (wakil LDP) rancangan ini dapat disetujui dan disahkan oleh parlemen tanggal 29 Januari 1994 sebagai UU Pembaharuan Politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akimoto, Ritsuo dan Shigeru Katsmura. 1989. *Masyarakat dan Politik di Jepang*. (Terjemahan). Waseda University: Japan International Agency.
- Almond Gabriel, A dan G. Bigham Powel Jr. 1978. *Comparative Politics System: Process and Policy*, 2nd Edition. Boston: Little Brown and Company.
- Almon, Gabriel A. “Kelompok Kepentingan dan Partai Politik” dalam Mohtar Mas’oed, Colin Mac. Andrews, (ed.). *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Press, 1993).
- Beardwald, Hane. 1986. *Political Party in Japan*. London: Allen & Unwin Ltd.
- Benedict, Ruth. 1982. *Pedang Samurai dan Bunga Seruni: Pola-Pola Kebudayaan Jepang* Diterjemahkan oleh Pamuji. Jakarta: Sinar Harapan.
- Bone, Huges, A. dan Astin Ranney. 1981. *Politics and Voters*. New York: Mc. Graw-Hill Book Company.
- Chie, Nakane. “Interpersonal Relationship in A Vertical Society” (*Tate Shakai No Ningen Kankei*) dalam Murakami Hyoe dan Edward G. Seidensticker, *Guide To Japanese Culture*. Tokyo: The Toppan Printing Co. Ltd., 1977.
- Dai Nippon Printing. *The National Diet of Japan: The House of Representative*. Tokyo: Dai Nippon Co. Ltd.
- Echol, John M. Hassan Shadily. 1984. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Hrebenar, Ronald J. 1986. *The Japanese Party System: From One Party Rule to Coalition Government*. London: Westview Press.
- Ishii, Ryosuke. 1988. *Sejarah Institusi Politik Jepang*. Diterjemahkan oleh J.R. Sunaryo. Jakarta: Yayasan Karti Sarana bekerjasama dengan Penerbit PT Gramedia.

- Johnson, Doyle Paul. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Alih bahasa Robert MZ Lawang. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kashiwa Shobo. 1993. *Nihon Koku Kenpoo (The Constitution of Japan)*. Japan: Kashiwa Shobo Publishing C. Ltd.
- Kodansha International. 1991. *Kodansha's Compact Kanji Guide A New Character Dictionary for Student and Professional*. Tokyo: Kodansha Internasional Co. Ltd.
- Koichi, Kishimoto. 1982. *Politics in Modern Japan: Development and Organization*. Tokyo: Japan Echo Inc.
- Mente, Boye De. 1986. *Bisnis Cara Jepang*. Alih bahasa Candra Hasan. Jakarta: PT Pantja Simpati.
- Marbun, B.N. (ed.).1986. *Manajemen Jepang: Ontologi Tentang Pertumbuhan dan Posisi Manajemen Jepang Dewasa Ini*. Seri manajemen No. 73. Jakarta: PT Puustaka Binaman Pressindo.
- Niemi, Richard dan Herbert F. Weiberg. 1984. *Conservative in Voting Behavior*. Edisi II. Washington DC Congressional Quarterly Inc.,
- Reischauer, Edwin O. "Sistem Politik Jepang" dalam Mohtar Mas'ood dan Colin Mac Andrews (ed.), *Perbandingan Sistem Politik*. Gajah Mada University Press, 1993.
- Rosenbaum, Walter A. 1975. *Political Culture, Basic Concepts in Political Science*. New York: Preager Publishers.
- Sudihardjo, Prajudi Atmo. (et al.). 1983. *Konstitusi Jepang*. Seri Konstitusi dalam Bahasa Indonesia-Inggris. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Surajaya, I Ketut. "Segi Tiga Besi dan Pembaharan Politik Jepang" dalam *Jurnal Lembaga Penelitian dan Pendidikan Kepada Masyarakat*. September 1994, Tahun III No. 1. Jakarta: Universitas Darma Persada.
- , 1995. *Pembaharuan Politik Jepang: Tinjauan Terhadap Sistem 1955*. Depok: Pusat Studi Jepang UI.

-----, "Masalah Moralitas Politik: Pelajaran yang Menarik dari Proses Demokrasi Jepang" dalam *Sinar Harapan*, Rabu 4 Januari 1984.

Suryohadiprojo, Sayidiman. 1987. *Belajar dari Jepang: Manusia dan Masyarakat Jepang dalam Perjuangan Hidup*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Stockwin, JAA. 1984. *Pluralisme Politik dan Kemajuan Ekonomi Jepang*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Tsunaeshi, Warren M. 1966. *Japanese Political Style: An Introduction to the Government and Politics of Modern Japan*. New York: Harper and Row Publisher.